

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hamid.S.Attamimi,"*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*,"Disertasi,Universitas Indonesia, Jakarta,1990,Hlm.302
- Abdussalam,"*Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*,"Restu Agung,Jakarta,2009,Hlm.86
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.67.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia, Malang, 2006, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), h. 1.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37.
- Christian Damero Sitompul,"*Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* ", Jurnal Ilmiah
- E.Fernando M.Manullang,"*Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*,"Kencana,2016
- E.Utrecht,"*Pengantar dalam Hukum Indonesia*,"Cetakan keenam,PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta,1959,hlm26,37
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi,"*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,"Storia Grafika,Jakarta,2002,Hlm.106
- Guntur Setiawan,"*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*,"Remaja Rosdakarya, Bandung,2004
- Harsono,Hanifah,"*Implementasi Kebijakan dan Politik*,"PT Mutiara Sumber Widya, Bandung,2002

- Hartono, "*Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*," Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 79
- I Gusti Ngurah Wairocana, "*Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*," Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, Hlm. 214
- Indroharto, "*Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*," Jakarta, 1984, Hlm. 212-213
- Jan Remmelink, "*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*," Gramedia, Pustaka Jakarta, 2003, hlm. 1
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.
- M. Yahya Harahap, "*Permasalahan dan Penerapan KUHAP*," Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 101
- Maria Farida Indrati Soeprapto, "*Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*," Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 11-18
- Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni, Bandung, 1980, h. 17.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19
- P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung, 1979, h. 7.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1990. h. 249.
- R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*," 1988, 251
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h. 13.
- Satjipto Rahardjo, "*Membelah Hukum Progresif*," Jakarta, Kompas, 2006, Hlm. 6

Sudargo Gautama,"*Pengertian Tentang Negara Hukum*," Liberty, Yogyakarta, 1973, Hlm.9

Sudikno Mertokusumo,"*Penemuan Hukum(Sebuah Pengantar)*",Liberty,Edisi Kedua(Cetakan Kedua),Yogyakarta,2006,Hlm.11

Sudikno Mertokusumo,"*Teori Hukum*",Cahaya Atma,2012,Hlm.11

Usman, Nurdin,"*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,"PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

C. Internet

Salinan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015

Kalvin Kawengian,"Wewenang Pra Penuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Jurnal Ilmiah Christian Damero Sitompul, "Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

Bimbingan,"*Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis*"